

**ANALISIS HUBUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
(Studi Tentang Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai “ BLT “)**

IRA INDRIANI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah

ABSTRACT

Analysis of Government Policy Relation to the Prosperity of the Poor in Tanjung Redeb, Berau (Study of Direct Cash Assistance Program Policy "BLT").

The purpose of this study is to obtain information on Government Policy Relation in the form of Direct Cash Assistance (BLT) to the Wellbeing of the Poor in Tanjung Redeb, Berau.

Based on the results of the research note that the price of empirical rs smaller than the rs table is $-0.058 < 0.380$, means there is no relationship between Government Policy in the form of Direct Cash Assistance with the Welfare of the Poor in the Tanjung Redeb Berau, thus the hypothesis is rejected.

Keywords: Government Policy Relation, Prosperity, BLT

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan ke depan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk.

Bersamaan dengan itu pula pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM.

Program BLT tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005 – 2006. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterimakan per triwulan sebesar Rp 300.000,-.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang.

Permasalahan kemiskinan hal yang sangat sering di dengar, salah satunya di Kabupaten Berau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Berau jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 193.831 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 103.579 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 90.252 jiwa, yang terdiri dari 13 Kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, Tabalar, Biduk-Biduk, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Pulau Derawan, Maratua, Kelay dan Segah, sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 6.614 jiwa berdasarkan jumlah penerima Raskin tahun 2011. Permasalahan yang dihadapi pemerintah khususnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, saat ini dalam pelaksanaan program bantuan sosial berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang sasaran utamanya adalah masyarakat miskin / masyarakat kelas bawah berdasarkan stratifikasi sosial, ternyata menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks pada setiap program bantuan sosial, hal ini disebabkan pelaksanaan program tersebut tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran yang dimaksud adalah orang-orang yang menikmati bantuan sosial tersebut tidak merata, bahkan masyarakat yang berada di kelas atas pun dapat menerima bantuan sosial tersebut dengan mudah.

PSKS di Kabupaten Berau direalisasikan mulai tanggal 21

November 2014, dimana bagi masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) akan mendapatkan dana bantuan PSKS, dimana pada saat Pemerintah SBY nama PSKS adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kemudian diubah oleh pemerintahan Jokowi menjadi PSKS.

PSKS di Kabupaten Berau pada saat pemerintahan SBY tunjangan yang diberikan sebesar Rp.150.000/bulan untuk setiap kepala keluarga, sementara di era pemerintahan Jokowi di tambah menjadi Rp.200.000/bulan. Di Kabupaten Berau sendiri pendataan untuk penerima PSKS berdasarkan data penerima RASKIN 2011.

Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu : “ Apakah Terdapat Hubungan Kebijakan Pemerintah Berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ? “

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :
“ Untuk memperoleh informasi mengenai Hubungan Kebijakan Pemerintah Berupa Bantuan Langsung

Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau “.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut World Health Organization, (world Bank,1995), kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada Negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata.

Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang

tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Tabel 1 Dasar Penyaluran BLT

No	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dasar Peraturan	Inpres no: 12 tahun 2005	Inpres no: 3 tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 bulan	7 bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,-/periode	Rp 300.000,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber : BPS tahun 2006 dan Departemen Sosial 2008

Tahun 2005 – 2008 Bantuan Langsung Tunai (BLT) berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sememetera (BLSM) Tahun 2013 sampai akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan di tahun 2015 awal pemerintahan Presiden Jokowi BLSM berganti nama kembali menjadi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Adapun variabel yang diturunkan dari judul penelitian diatas adalah Variabel Bebas:1.Sumber Daya

2.Komunikasi

3.Disposisi

Variabel Terikat: 1.Kesejahteraan Masyarakat

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah sebanyak 4.781, dimana jumlah penduduk miskin berdasarkan data penerima Raskin tahun 2013 sebanyak 4.758 ditambah dengan 23 orang karyawan Kantor Pos, dan pengambilan sampel dilakukan secara judgment sampling, dengan didasarkan pada alasan dan pertimbangan bahwa untuk dapat menilai dengan baik Pengaruh kebijakan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tanjung Redeb , maka sampel yang diambil berasal dari orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti dan situasi kondisi dari lokasi penelitian.

Adapun cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Menurut Sugiyono (2004:74) dikatakan simpel (sederhana) karena “Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Maka jumlah sampel yang diambil berasal dari karyawan Kantor Pos Tanjung Redeb sebanyak 10 orang

dan masyarakat miskin di Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 10 orang, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 20 orang.

Jenis dan Sumber Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:28) menjelaskan bahwa “ Dalam penelitian verifikatif atau penelitian untuk menguji teori, seorang peneliti akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah baru yakni status hipotesa, yang berupa suatu kesimpulan apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak, informasi ini diperoleh melalui pengujian hipotesa.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat verifikatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu mempelajari pengaruh antara Sumber Daya, Komunikasi dan Disposisi kebijakan Bantuan Langsung Tunai terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Teknik Pengumpulan Data

Didalam penulisan ini untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian kepustakaan yaitu sebagai sarana untuk mempelajari

dan mengumpulkan teori dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis mengadakan 3 (tiga) cara:

- Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian.
- Wawancara yaitu penulisan melakukan komunikasi langsung dengan responden dalam melengkapi keterangan dalam penelitian ini.
- Angket yaitu di perlukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun kepada responden.

3. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu mempelajari data-data yang ada secara tertulis. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi :

Sejumlah responden yang terangkum dalam sampel sebagai sumber data primer.

Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Berau serta Pemerintah setempat yang berkaitan dengan responden penelitian.

Alat Ukur

Alat pengukuran data yang penulis gunakan adalah Skala Ordinal.

Surtisno Hadi (2000:93) mengemukakan bahwa “Skala Ordinal adalah ukuran yang menunjukkan posisi dalam suatu urutan-urutan dalam suatu seri, yang disebut juga skala berjenjang yang menggolongkan subyek menurut jenjangnya tanpa memperhatikan jarak antara golongan yang satu dengan yang lainnya.

Dengan berpedoman pada pendapat tersebut diatas, maka penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pilihan jawaban dengan jenjang (3,2,1) dimana jenjang skor yang diberikan pada tiap pertanyaan adalah sebagai berikut :

Responden yang menjawab (a) di beri skor 3

Responden yang menjawab (b) di beri skor 2

Responden yang menjawab (c) di beri skor 1

Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesisnya yang telah dikemukakan, penulis menggunakan teknik korelasi dan spearman yang dikutip Sidney Siegel (1994:263) dengan formulasi sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{(\sum X^2 \cdot \sum Y^2)}}$$

Sementara itu bila terdapat jumlah angka yang sama, rumus yang digunakan adalah :

$$\sum X^2 = \frac{N^2 - N}{12} \sum Tx$$

$$\sum Y^2 = \frac{N^2 - N}{12} \sum Ty$$

$$Tx = Ty = \frac{t^2 - t}{12}$$

Keterangan :

rs : Koefisien Korelasi Rank Spearman

$\sum di^2$: Jumlah keseluruhan di^2 dimana di merupakan harga masing-masing subyek diperoleh dari selisih antara rangking X dan Y

X : Independen Variabel

Y : Dependen Variabel

N : Jumlah Responden

T : Banyaknya himpunan berangka sama

Tx : Faktor Korelasi X

Ty : Faktor Korelasi Y

12 : Bilangan Konstan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Tanjung Redeb adalah ibu kota dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

Lokasi dan luas wilayah Kecamatan Tanjung Redeb : Secara astronomis Kota Tg.Redeb terletak antara 116° BT, 119° BT, 233° Lintang Utara, 1° Bujur Timur. Secara

geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administrative (kewilayahan)

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Redeb Berdasarkan Agama yang Dianut

AGAMA	JUMLAH
ISLAM	72.158
PROTESTAN	7.560
KATHOLIK	2.265
HINDU	106
BUDHA	758
KONGHUCHU	6
LAINNYA	4
JUMLAH	8.2857

Sumber Data: BPS Kabupaten Berau

Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb. Berdasarkan angka statistic hampir 90 % pemeluk agama masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb mayoritas beragama Islam selain agama Potestan, Katholik. Hindu, Budha dan Kong Huchu. Dan dari berbagai etnis suku yang menghiasi keragaman suku pada masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb yaitu. Suku Banjar, Jawa, Bugis, Toraja, Timor, Dayak dan Banua. Dan dari keragaman suku etnis pada masyarakat tersebut justru menghasilkan tujuan dan nilai yang sama dalam ikut serta terlibat langsung dalam proses pembangunan di segala bidang.

Oleh karena itu geliat pembangunan pada kabupaten Berau khususnya kecamatan Tanjung Redeb selalu berjalan dinamis. Berbagai pusat kegiatan yang ada di kecamatan Tanjung Redeb adalah, Kantor

Pemerintahan daerah Kab. Berau, Polres Kab. Berau, RSUD Abd.Rivai, Kantor PLN Cabang Berau, PDAM Tirta, Dunia Perbankan seperti; BNI, BRI, Bank Kaltim (BPD), Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mega, Bank Mandiri. Kantor Pos cab. Berau, Masjid Agung Baitul Hikmah (Masjid kabupaten) dan lain-lain. Umumnya Masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb mata pencahariannya PNS, pekerja swasta di sektor perusahaan Tambang Batu Bara, Wiraswasta dan lain-lain.

Data Hasil Penelitian

Sebelum penulis menyajikan data hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan masing-masing variabel yang telah dijabarkan dalam bentuk koesioner atau pertanyaan yang kemudian dijumlahkan sesuai tabel, dimana variabel X adalah Kebijakan Bantuan Langsung Tunai, sedangkan variabel Y adalah Kesejahteraan, dibawah ini :

Keadaan Responden Penelitian

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	14	70
2	Perempuan	6	30
Jumlah		20	100

Sumber data : Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden terbanyak adalah laki-laki yaitu 14 orang (70%) dan perempuan sebanyak 6 orang (30%).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Deskripsi Pendidikan Responden

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidik	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD	2	10
2	SLTP	7	35
3	SLTA	7	35
4	Perguruan Tinggi	4	20
Jumlah		20	100

Sumber data : Diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan rendah yaitu 2 orang (10%) yang hanya lulus SD, dan jumlah pendidikan terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA dan SLTP yaitu 7 orang (35%).

Deskripsi Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data masing-masing pekerjaan responden yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	PNS	0	0
2	Karyawan	14	70
3	Swasta	6	30
4	Wiraswasta Tidak Bekerja	0	0
Jumlah		20	100

Sumber data : Diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling dominan dari responden yang ada, adalah Karyawan Swasta sebanyak 14 orang (70%), sedangkan dari 20 responden yang ada, tidak ada yang tidak bekerja.

Analisis

Pada bagian analisis ini akan penulis sajikan tabel skor yang memuat variabel X yaitu Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dan variabel Y yaitu Kesejahteraan Masyarakat dalam satu tabel berikut ini, dimana : Nomor Responden dengan symbol (N) Independen variabel yaitu pembangunan, dengan symbol (X) Dependen variabel yaitu sosial ekonomi, dengan symbol (Y)

Tabel 6 Rangkuman Independen Variabel (X) dan Dependen Variabel (Y)

No	No.Urut responden (N)	Independen Variabel (X)	Dependen Variabel (Y)
1	01	18	13
2	02	27	11
3	03	23	10
4	04	23	11
5	05	17	13
6	06	22	11
7	07	27	12
8	08	18	9
9	09	15	10
10	10	18	7
11	11	18	13
12	12	26	7
13	13	22	12
14	14	26	13
15	15	17	13
16	16	26	9
17	17	15	12
18	18	26	10
19	19	22	7
20	20	15	12
	Jumlah	421	215

Sumber Data : Hasil Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa data yang telah diuraikan dalam bab IV, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis, dimana hasil dari analisis ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengujian hipotesis, apakah hipotesis diterima atau ditolak, dan analisis data yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Rank Spearman yang menggunakan skala ordinal yang berbentuk ranking atau peringkat sesuai dengan tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7 Penyusunan Ranking Berdasarkan Distribusi Skor Variabel

X dan Variabel Y

No	No Urut Responden (N)	Skor/Nilai (X)	Ranking	No Urut Responden (Y)	Skor/Nilai (Y)	Ranking
1	2	27	1,5	1	13	3
2	7	27	1,5	5	13	3
3	12	26	4,5	11	13	3
4	14	26	4,5	14	13	3
5	16	26	4,5	15	13	3
6	18	26	4,5	7	12	7,5
7	3	23	7,5	13	12	7,5
8	4	23	7,5	17	12	7,5
9	6	22	10	20	12	7,5
10	13	22	10	2	11	11
11	19	22	10	4	11	11
12	1	18	13,5	6	11	11
13	8	18	13,5	3	10	14
14	10	18	13,5	9	10	14
15	11	18	13,5	18	10	14
16	5	17	16,5	8	9	16,5
17	15	17	16,5	16	9	16,5
18	9	15	19	10	7	19
19	17	15	19	12	7	19
20	20	15	19	19	7	19
	Jumlah	421	210	Jumlah	215	210

Sumber Data : Hasil Jawaban Responden

Selanjutnya setelah ranking atau urutan responden disusun, untuk langkah selanjutnya penulis membuat tabel persiapan Uji Korelasi Rank Spearman.

Untuk perhitungan angka sama 27, diperoleh sebanyak 2 angka, maka:

$$T_x 27 = \frac{2^3 - 2}{12} = \frac{6}{12} = 0,5$$

Untuk perhitungan angka sama
26, diperoleh sebanyak 4 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 26} &= \frac{4^3 - 4}{12} \\ &= \frac{60}{12} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama
23, diperoleh sebanyak 2 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 23} &= \frac{2^3 - 2}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama
22, diperoleh sebanyak 3 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 22} &= \frac{3^3 - 3}{12} \\ &= \frac{24}{12} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama
18, diperoleh sebanyak 4 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 18} &= \frac{4^3 - 4}{12} \\ &= \frac{60}{12} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama
17, diperoleh sebanyak 2 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 17} &= \frac{2^3 - 2}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama
15, diperoleh sebanyak 3 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tx 15} &= \frac{3^3 - 3}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh $\sum \text{Tx} = 0,5+5+0,5+2+5+0,5+2 = 15,5$, jadi **$\sum \text{Tx}$ adalah 15,5.**

Kemudian untuk perhitungan $\sum \text{Ty}$ sesuai dengan jumlah angka sama yang didapatkan sebagai berikut :

Untuk perhitungan angka sama
13, diperoleh sebanyak 5 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Ty 13} &= \frac{5^3 - 5}{12} \\ &= \frac{3.120}{12} \\ &= 260 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama 12, diperoleh sebanyak 4 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Ty 12} &= \frac{4^3 - 4}{12} \\ &= \frac{60}{12} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama 11, diperoleh sebanyak 3 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Ty 11} &= \frac{3^3 - 3}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama 10, diperoleh sebanyak 3 angka, maka:

$$\begin{aligned} \text{Ty 10} &= \frac{3^3 - 3}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan angka sama 9, diperoleh sebanyak 2 angka, maka :

$$\begin{aligned} \text{Ty 9} &= \frac{2^3 - 2}{12} \\ &= \frac{6}{12} \end{aligned}$$

$$= 0,5$$

Untuk perhitungan angka sama 7, diperoleh sebanyak 3 angka, maka :

$$\text{Ty 7} = \frac{3^3 - 3}{12}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{6}{12} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh $\sum \text{Ty} = 260+5+2+2+0,5+2 = 271,5$, jadi $\sum \text{Ty}$ adalah **271,5**.

Pembahasan

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai korelasi adalah -0,058. Apabila r_s empiris dibandingkan dengan r_s tabel pada taraf signifikan 0,05 untuk tes satu sisi dengan $N = 20$, terlihat bahwa harga r_s empiris lebih kecil dari pada r_s tabel yaitu $-0,058 < 0,380$, berarti tidak terdapat hubungan antara Kebijakan Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan demikian hipotesis ditolak.

KESIMPULAN

1. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan

Sumber Daya Manusia yang harus mampu mengimplementasikan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Disposisi merupakan sikap pelaksana tugas dari suatu kebijakan yang harus memiliki komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan, sehingga akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

4. Kesejahteraan masyarakat sangatlah penting melalui suatu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya untuk masyarakat, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang termasuk kategori miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan analisis perhitungannya yang dilakukan yaitu harga rs empiris lebih kecil dari pada rs tabel yaitu $-0,058 < 0,380$, berarti tidak terdapat hubungan antara Kebijakan Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan demikian hipotesis ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Danar Wijaya-Brawijaya University, Malang.

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro

Departemen Sosial RI, 2008, *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*, Depsos RI, Jakarta.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Effendi, Tadjuddin Noer, 1992. *Perilaku Mobilitas dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga: kasus 2 desa di Jawa Barat*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI.
- Moekijat (1995), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju
- Muhidin, Syarif. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. 1992. STKS Press:Bandung.
- Mulyadi S. (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Hadari. 1998. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*,
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 *Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Berau
- <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>
- <http://hykurniawan.wordpress.com/2012/02/16/implementasi-kebijakan-publik-aspek-komponen-aktifitas-dan-tahapan/>